

“Dampak Penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) terhadap Eksistensi Hak Nelayan Tradisional di Kabupaten Kepulauan Selayar” oleh Ryan Anshari (B11108 416), yang dibimbing oleh Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur.

ABSTRAK

Penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) sebagai upaya perlindungan bagi ekosistem terumbu karang merupakan daerah larang ambil sehingga menciptakan opini akan adanya dampak negatif yang akan ditimbulkan terhadap eksistensi hak nelayan tradisional. Penelitian ini dilakukan di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) dan data sekunder yang diperoleh dari kajian buku-buku, karya ilmiah, literatur dan bahan pustaka lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) berdampak positif terhadap eksistensi hak nelayan tradisional yang ada di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan upaya perlindungan hukum bagi eksistensi hak nelayan tradisional atas penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan dan pengawasan kepada masyarakat nelayan atas Daerah Perlindungan Laut (DPL) tersebut sehingga nelayan merasa tidak kehilangan hak atas keberadaan Daerah Perlindungan Laut (DPL).

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang berdomisili di wilayah pesisir beraktifitas sebagai nelayan. Bahkan penduduk ini sangat bergantung pada kekayaan perairan dan hanya mengandalkan pendapatan ekonomi dari hasil melaut. Dan sampai saat ini dapat dilihat kesejahteraan hidup mereka memang masih tergolong rendah.

Ketergantungan masyarakat pada kekayaan perairan ini dapat berdampak buruk bagi sumber daya alam yang ada. Dikhawatirkan pengeksploitasian yang tidak dibarengi dengan perawatan atau konservasi akan merusak dan membuat sumber daya alam yang ada akan semakin menipis bahkan habis.

Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan adanya penetapan kawasan konservasi laut. Yang diharapkan dapat mengimbangi

pengeksploitasian besar-besaran yang telah dilakukan oleh masyarakat di wilayah pesisir dalam hal ini adalah nelayan, yang hidupnya memang bergantung pada kekayaan sumber daya alam perairan dan kelautan.

Penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) ini tujuan untuk melindungi habitat-habitat kritis, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas sumber daya, melindungi keanekaragaman hayati, dan melindungi proses-proses ekologi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai. Adapun pertimbangan memilih lokasi tersebut menjadi lokasi penelitian karena lokasi tersebut merupakan wilayah pesisir yang terdapat permukiman masyarakat nelayan, dimana keseharian mereka beroperasi di sekitar wilayah tempat tinggal mereka, yang kemudian

ditetapkan Daerah Perlindungan Laut (DPL) sebagai upaya konservasi sumber daya perikanan oleh pemerintah kabupaten.

Jenis data yang akan diperoleh dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari hasil survey, angket/kuisisioner dan wawancara dengan beberapa responden masyarakat nelayan dan narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari studi kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, laporan hasil penelitian, peraturan, *website*, dan dokumen-dokumen yang akan diperoleh dari instansi terkait.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk kualitatif, selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis hukum normatif yang bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penetapan Daerah Perlindungan Laut

Penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kawasan konservasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) ini bertujuan untuk melindungi terumbu karang, dan penetapannya ini diselenggarakan oleh Coremap II (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*) yang memang bertujuan melindungi, merehabilitasi dan memanfaatkan secara lestari terumbu

karang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tahapan penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah :

a. Tahap Perencanaan

Tahapan ini lebih menitikberatkan pada dasar penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) tersebut, yaitu apa yang menjadi tujuan dan manfaat penetapannya. Penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Desa Barugaia sendiri didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya dilihat dari kondisi lautnya yang menurut para nelayan jumlah ikannya semakin menurun. Hal ini kemudian ditelusuri dan ditemukan bahwa penyebabnya karena banyaknya terumbu karang yang hancur. Maka sebagai bentuk upaya perlindungan dan rehabilitasi terumbu karang ditetapkanlah Daerah Perlindungan Laut (DPL).

b. Musyawarah Desa

Pada tahap ini akan dijelaskan semua yang berkaitan dengan Daerah Perlindungan Laut (DPL) kepada masyarakat, termasuk menjelaskan tujuan, manfaat dan ketentuan-ketentuan Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang harus diikuti oleh masyarakat nelayan. Selain itu, pada tahap ini juga akan ditentukan lokasi DPL serta meminta persetujuan dan partisipasi masyarakat nelayan dalam penetapan dan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL).

c. Survey Lokasi

Pada tahap inilah akan dilakukan pengamatan langsung terhadap daerah/kawasan yang telah sepakati oleh nelayan untuk dijadikan Daerah

Perlindungan Laut (DPL). Pada tahap ini juga akan menentukan luas, batasan dan titik-titik koordinat dari Daerah Perlindungan Laut tersebut.

Luas Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Desa Barugaia adalah 10,1 Ha, dengan Luas zona inti sebesar 2,5 Ha dan zona penyangga sebesar 7,6 Ha. Dan adapun titik-titik koordinat dari Daerah Perlindungan Laut adalah sebagai berikut :

Zona	Titik Koordinat
Penyangga	6.02508°LS, 120.44292°BT. 6.02506°LS, 120,44456°BT. 6.02977°LS, 120,44297°BT. 6.02975°LS, 120,44469°BT.
Inti	6.02739°LS, 120.44335°BT. 6.02737°LS, 120.44435°BT. 6.02943°LS, 120.44443°BT. 6.02943°LS, 120.44342°BT.

d. Sosialisasi

Pada tahapan ini akan dibicarakan kepada masyarakat mengenai hasil survey dan penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL). Selain itu, dalam sosialisasi juga membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Daerah Perlindungan Laut. Ketentuan-ketentuan tersebut juga dimusyawarahkan dengan masyarakat nelayan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang dimaksud dapat diikuti dan ditaati oleh masyarakat nelayan. Ketentuan-ketentuan ini akan dibentuk menjadi Peraturan Desa (Perdes) dan di Desa Barugaia ketentuan-ketentuan

tersebut dibentuk menjadi Peraturan Desa Barugaia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Daerah Perlindungan Laut (DPL).

2. Pengelolaan dan Pengawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL)

1. Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL)

Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM). Pembentukan dan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) ini dilakukan bersama antara masyarakat, pemerintah setempat, dan para pemangku kepentingan lain yang ada di desa.

Secara rinci Daerah Perlindungan Laut di Desa Barugaia dikelola oleh LPSTK (Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang) lembaga dari Coremap II dan Pokmas Konservasi yang merupakan kelompok masyarakat Desa Barugaia. Dan pada umumnya semua kelompok ini beranggotakan masyarakat nelayan yang berdomisili di Desa Barugaia.

Dalam pengelolaan Daerah Perlindungan Laut di Desa Barugaia diterapkan juga sistem zonasi yaitu membagi Daerah Perlindungan Laut menjadi 2 (dua) zona. Adapun zona yang dimaksud adalah :

a. Zona Inti

Zona ini merupakan lokasi terumbu karang yang dilindungi dari berbagai kegiatan pemanfaatan dan aktifitas manusia lainnya. Hal ini disebabkan zona inti akan berperang sebagai tabungan perikanan, sehingga

ikan dalam zona ini tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan. Kegiatan eksploitasi hewan laut lainnya seperti karang, teripang, kerang-kerangan atau organisme hidup lainnya juga dilarang dalam zona inti ini.

b. Zona Penyangga

Zona penyangga adalah zona yang berada di sekeliling zona inti. Berbeda dengan zona inti, dalam zona penyangga diperbolehkan melakukan kegiatan tetapi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Peraturan Desa Barugaia Nomor 3 Tahun 2009.

2. Pengawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL)

Sama halnya dengan pengelolaan, pengawasan Daerah Perlindungan Laut juga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dibentuk oleh pemerintah setempat dan kelompok masyarakat. Pengawasan Daerah Perlindungan Laut di Desa Barugaia sendiri lebih banyak dilakukan oleh masyarakat nelayan. Hal ini disebabkan masyarakat nelayan lebih sering berada di sekitar Daerah Perlindungan Laut tersebut.

Sementara itu, dari pihak pemerintah lebih menfokuskan pada pengawasan jarak jauh yaitu pemantauan Daerah Perlindungan Laut dengan cara melihat dari kejauhan dengan menggunakan teropong. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah lebih mengharapkan pengawasan Daerah Perlindungan Laut tersebut dilakukan oleh nelayan. Namun masyarakat nelayan tidak diberikan fasilitas untuk mengelola dan mengawasi Daerah Perlindungan Laut tersebut.

3. Dampak Penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL)

Pada perencanaan penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar mendapat banyak kritikan dari masyarakat nelayan. Hal ini berdasar pada opini masyarakat yang beranggapan Daerah Perlindungan Laut sebagai daerah larang ambil dapat berdampak negatif pada eksistensi mereka.

Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah setempat masyarakat akhirnya menyetujui penetapan DPL tersebut, bahkan penetapan, pengelolaan serta pengawasan DPL melibatkan masyarakat nelayan setempat. Dan sekarang DPL dirasakan bermanfaat bagi masyarakat nelayan. Hal ini tergambarkan dari adanya nelayan yang mengatakan adanya DPL meningkatkan hasil tangkapan mereka yang beroperasi di sekitar DPL tersebut.

4. Upaya Perlindungan Hukum bagi Eksistensi Hak Nelayan Tradisional atas Penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL)

Perlindungan hukum bagi eksistensi hak nelayan tradisional atas penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) tidak diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga secara hukum tidak ada jaminan bagi eksistensi hak nelayan atas penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL).

Maka sebagai upaya perlindungan hukum bagi eksistensi hak nelayan tradisional di Kabupaten Kepulauan Selayar, pemerintah setempat melibatkan masyarakat dalam proses penetapan, pengelolaan dan

pengawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL) tersebut. Sehingga masyarakat nelayan tidak merasa kehilangan hak atas daerah penangkapan mereka meskipun di daerah tersebut tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan. Bagi masyarakat nelayan Daerah Perlindungan Laut (DPL) tersebut akan menjadi kolam atau tempat ikan berkembang sehingga akan dapat menjadi solusi atas pengeksploitasian yang dilakukan.

Keterlibatan masyarakat nelayan dalam penetapan, pengelolaan dan pengawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL) juga menumbuhkan rasa memiliki nelayan atas Daerah Perlindungan Laut tersebut. Masyarakat nelayan telah menganggap Daerah Perlindungan Laut tersebut adalah kolam ikan milik mereka sehingga mereka akan terus menjaga Daerah Perlindungan Laut tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) berdampak positif terhadap eksistensi hak masyarakat nelayan khususnya di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini terlihat dari adanya manfaat yang dirasakan oleh nelayan yaitu meningkatnya jumlah ikan yang ada di sekitar Daerah Perlindungan Laut tersebut. Manfaat ini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan yang tentunya akan

menjaga eksistensi hak masyarakat nelayan itu sendiri.

2. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi eksistensi hak nelayan tradisional atas penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan dan pengawasan Daerah Perlindungan Laut tersebut kepada masyarakat nelayan sehingga masyarakat nelayan tidak merasa kehilangan hak atas keberadaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) tersebut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil oleh penulis, maka penulis menyarankan :

1. Lebih aktif dalam pengelolaan dan pengawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL) khususnya pemerintah karena kebanyakan pengelolaan dan pengawasan Daerah Perlindungan Laut yang ada di Desa Barugaia dilakukan oleh nelayan, sementara nelayan tidak diberikan fasilitas untuk mengelola dan mengawasi Daerah Perlindungan Laut tersebut.
2. Perlunya dibuatkan suatu peraturan formal yang bisa lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi eksistensi hak nelayan tradisional, khususnya berkaitan dengan penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL).

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Fauzi. 2010. *Ekonomi Perikanan Teori, Kebijakan dan Pengelolaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Johannes Widodo, Suhadi. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- M. Arif Nasution. 2005. *Isu-Isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- M. Yusuf DM. 2002. *Kemiskinan Nelayan Tradisional di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*. Tesis. PPs Unhas. Makassar.
- Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rizky Muhartono. 2004. *Alternatif Pola Bagi Hasil Nelayan Gillnet di Muara Baru Jakarta Utara*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sri Susyanti Nur. 2010. *Hak Guna Laut dalam Usaha Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (Suatu Kajian Hukum Agraria Kelautan)*. Pustaka Pena Press Makassar.
- Sudirman Saad. 2003. *Politik Hukum Perikanan Indonesia*. Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta.
- , 2009. *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan*. LkisYogyakarta. Yogyakarta.
- Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Supriharyono. 2009. *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria-Kajian Komprehensif*. Kencana. Jakarta.
- Yuliana. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penangkapan Ikan Nelayan Tradisional di Kabupaten Mamuju*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Sumber Lain

1. Artikel berjudul "Potensi Sumber Daya Perairan Indonesia". diakses di <http://jluppholephel.blogspot.com/2012/03/kekayaan-laut-indonesia.html>. pada pukul 19.02 tanggal 17 Oktober 2012.
2. Laporan Tahunan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Materi seminar yang berjudul “Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan” oleh Tridiyo Kusumatmojo. Diakses di <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-%20tridiyo%20kusumastanto.pdf>. pada pukul 13.32 tanggal 20 Oktober 2012.

Sumber Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perikanan
3. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
4. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang
6. Peraturan Desa Barugaia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Daerah Perlindungan Laut (DPL)
7. Inpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.02/Men/2011 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.05/Men/2012 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.